

**Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan  
Desa Menuju Desa Mandiri (*Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan  
Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hilir**

The Role Of Headman's Leadership In Rural Empowerment Program To Self-Sufficient  
Village (*A Case Study At Pekan Kamis Sub-District Of Tembilahan Hulu*) Indragiri Hilir

**Muryusna**

[mur\\_yusna@yahoo.com](mailto:mur_yusna@yahoo.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka  
Graduate Studies Program Indonesia Open University

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, yaitu BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Kelompok Kerja serta Camat selaku koordinator program. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa peranan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian antara lain peran pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya, 1). Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, Kepala desa tidak melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM), 2). Dalam menyusun program kegiatan desa mandiri, kepala desa belum mengutamakan skala prioritas, 3). Strategi yang dilakukan kepala desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat, 4). Alokasi sumber daya belum optimal 5). Dalam pelaksanaan program kegiatan kepala desa tidak menfungsikan penanggung jawab atau kelompok kerja. 6). Dalam mengambil keputusan kepala desa kurang arif dan bijaksana, 7). Sebelum mengambil keputusan, Kepala desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja. Selain itu peran mempengaruhi, peran memotivasi, peran antar pribadi dan peran informasional juga belum berfungsi secara optimal. Dengan belum optimalnya peran Kepala Desa tersebut, maka pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, juga belum terlaksana sesuai dengan harapan.

**Kata Kunci** : Kepemimpinan, Pemberdayaan, Desa mandiri.

**ABSTRACT**

This study aimed at knowing the role of Pekan Kamis Village Chief leadership at Sub-District Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir District. This study is descriptive qualitative and aimed at understanding the reality through an inductive process of analysis. The

methodology is well known among naturalistic studies, in a sense that it is conducted in a natural setting. It is also well known as a qualitative method, because the data collected and the qualitative analysis was done by the people who were directly involved in the program management of rural development toward self-sufficiency. At Pekan Kamis village, they were BPD, LPM, Hamlet Chief, Neighborhood Chairmen (Ketua-Ketua RT/RW) and Chief of the District who was also the coordinator of program. Based on the result and analysis which was done during the interview with the interviewee it was clear that the role of the Pekan Kamis Village Chief was not yet optimal, It could be seen from the fact that the Village Chief decision making was not according to the villagers' expectations such as: 1) In deciding a target of self-sufficient village program, the Chief did not consult his team (BPP & LPM), 2) In developing self-sufficient programs the Chief did not focus on the priorities of the village, 3) His strategy of development did not focus on peoples' needs, 4) The allocation of resources was not optimal, 5) In implementing the program, the Chief did not make a coordinated effort or appointed a team, 6) In decision making, the Chief has not shown his understanding of the people, 7) In making decisions, the Chief never consulted others. The Chief neglected his role of influencing of motivating, of communicating with, and imparting information to his people. Therefore the Chiefs role as leader of Pekan Kamis village has far less impact on rural empowerment program than expected.

**Keywords :** *Leadership, Empowerment, self-sufficient village.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan desa pada level yang sangat strategis, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui secara hukum. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Selain itu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan (Abadi, 2003: 44).

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan desa serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ( Abdullah, 2007: 172).

Pembangunan desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Peran aktif dari pemerintah sebagai penyedia dana pembangunan tidaklah mampu menyediakan dana untuk pembangunan secara keseluruhan. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan stimulus yang bersifat rangsangan untuk memancing swadaya masyarakat. Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.

Sebagai implementasi dari Undang-undang 32 dan Undang-undang 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu terobosan melalui pembangunan infrastruktur Pedesaan dengan sistem pemberdayaan masyarakat setempat yang disebut dengan Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2010 pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa Program Pemberdayaan Desa menuju Desa mandiri yang selanjutnya disebut Program Desa Mandiri, adalah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat pedesaan yang makmur, mandiri dan sejahtera sesuai visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan gemilang tahun 2025.

Sebagai tahap awal program ini di uji cobakan pada 55 desa di Indragiri Hilir yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program bantuan pembangunan desa yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005, hasilnya cukup menggembirakan dan mampu menarik swadaya masyarakat sebesar 19,89 % dari total dana yang di kururkan. Mengingat program ini cukup berhasil menggerakkan pembangunan di pedesaan maka pada tahun 2006 kembali program ini di luncurkan untuk 171 Desa/ Kelurahan. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 program ini di luncurkan untuk seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 192 Desa/ Kelurahan (175 Desa, 17 Kelurahan).

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa, BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir juga menyusun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
2. Hasil pekerjaan melebihi dari target yang telah ditetapkan (Over prestasi).
3. Sinerginya lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program kegiatan.
4. Adanya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur program pemberdayaan desa.
5. Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Laporan administrasi keuangan dibuat dan disampaikan setiap bulan.
7. Laporan kemajuan fisik kegiatan pembangunan dibuat dan disampaikan setiap bulan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran Kepala Desa sangat penting dalam mengkoordinir perangkat desa dan lembaga masyarakat desa agar pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan desa menuju desa mandiri dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Dilihat dari kondisi dan fakta dilapangan, sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, secara fisik program ini 73,16 % sudah dapat dilaksanakan, namun dari segi prosedur dan ketentuan serta kriteria yang harus dipenuhi oleh desa masih belum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga berdampak terhadap hasil program yang telah ditetapkan, artinya pada akhir tahun anggaran kegiatan belum dapat dilaksanakan 100%, apalagi mendapatkan over prestasi.

Tidak tercapainya 100 % target program kegiatan desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sesuai target yang ditetapkan, bisa saja disebabkan oleh kurang berfungsinya peran Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

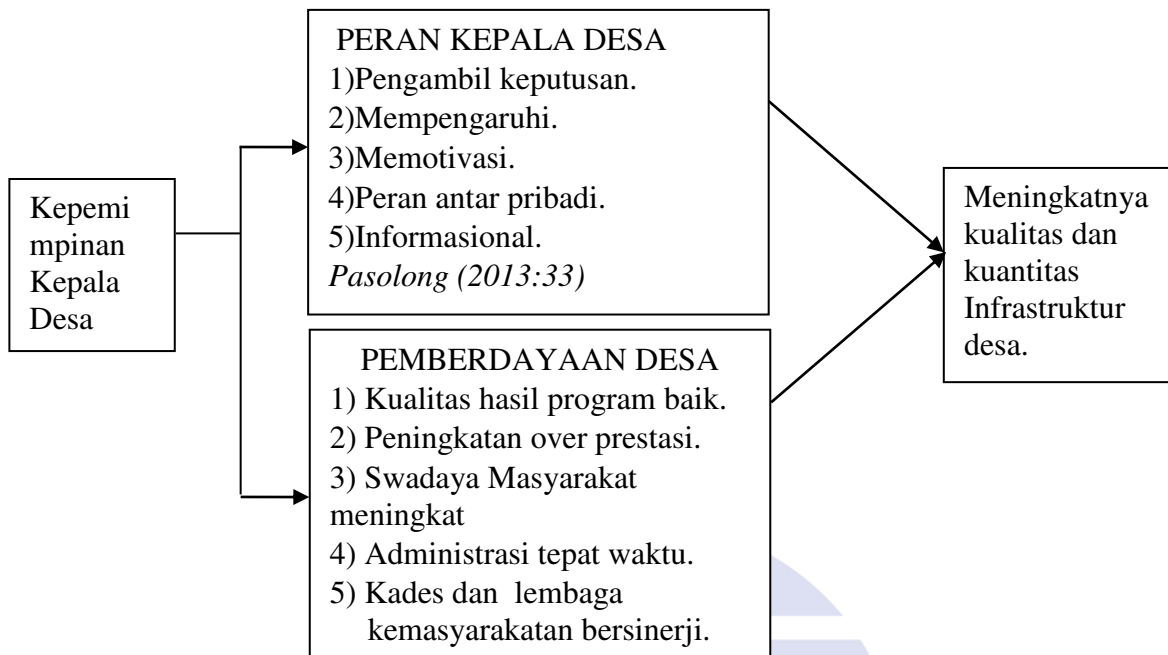
Melihat kondisi faktual tersebut dapat diduga bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa, masih kurang efektif melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pembangunan di desa. Dimana Kepala Desa belum mampu menciptakan visi, komunikasi, motivasi, koordinasi, dan memberdayakan bawahan serta pengambilan keputusan yang cenderung diputuskan sendiri, artinya peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri belum optimal, untuk membuktikan kebenarannya masih diperlukan analisis dan pengkajian lebih dalam, dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul;

**“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri (*Studi Kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hilir”**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Menurut Sugiyono (2009: 13) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Ilmu Manajemen yang memfokuskan pada bidang Manajemen Administrasi Publik. Secara lebih khusus pada aspek peranan kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan menuju desa mandiri. Bagan alur kerangka pemikiran peranan kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan menuju desa mandiri, dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan Gambar 1 dapat dibuat hubungan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mempunyai peranan mengambil keputusan, mempengaruhi, memotivasi, memainkan peran antar pribadi dan informasional.
- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan pembangunan diantaranya pemberdayaan desa.
- c. Terlaksananya pemberdayaan desa dengan baik akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa.

Informan dalam penelitian ini adalah Camat Tembilahan Hulu selaku pembina dan koordinator pelaksana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu yang menjadi informan adalah Pegawai Sekretariat Desa, Pengurus LPM, Pengurus BPD, Ketua RW, Ketua RT dan kelompok kerja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara; dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan.
3. Mengumpulkan data, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni menganalisa dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa/diteliti dalam penelitian, yaitu mengenai dampak program pemberdayaan desa menuju desa



mandiri terhadap pembangunan di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Pemimpin berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Kepala Desa merupakan bagian dari pemimpin birokrasi yang perannya sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Menurut Pasolong (2013: 33) peran pemimpin birokrasi terdiri dari, peran mengambil keputusan, peran mempengaruhi, peran memotivasi, peran antar pribadi dan peran informasional.

#### **Peranan mengambil keputusan.**

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut, dalam mengatur, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana program ini menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan, dibawah bimbingan dan koordinasi kepala desa.

Salah satu peran penting Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, antara lain melaksanakan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, perannya disini adalah bagaimana seorang Kepala Desa mengambil keputusan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Bekenaan dengan hal ini, yang menjadi peranan Kepala Desa dalam mengambil keputusan diantaranya, menetapkan skala prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, menunjuk penanggung jawab dan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk menetapkan sasaran program desa mandiri sudah semestinya Kepala Desa melibatkan mitra kerja seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kelompok Kerja melalui musyawarah desa, namun kenyataannya tidak demikian. Padahal kesemuanya itu merupakan potensi yang harus dimiliki oleh Kepala Desa dalam mengambil keputusan, selain potensi internal yang sudah dimiliki seperti ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kepemimpinannya.

#### **Peran mempengaruhi.**

Kepala Desa selaku pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga bawahan atau pengikut mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja. Apakah kepala desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, sudah melaksanakan peran ini terhadap bawahannya ?

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam mengambil keputusan tidak meminta masukan terlebih dahulu dari bawahan atau mitra kerja. Artinya Kepala Desa belum dapat mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, dengan demikian dapat dikatakan Kepala Desa Pekan Kamis belum dapat

melaksanakan peranya secara optimal mempengaruhi bawahan dan mitra kerjanya dalam bekerja.

#### **Peran Memotivasi.**

Berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai atau bawahan untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah peran mempengaruhi yang efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan. Motivasi dapat diartikan sebagai proses untuk mencoba mempengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu, (Uno, 2011:1).

Berkenaan dengan peran pemimpin kepala desa Pekan Kamis dalam memberikan motivasi kepada bawahan atau mitra kerjanya, penulis telah melakukan wawancara dengan informan.

Dari jawaban informan, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Pekan Kamis boleh dikatakan tidak ada memberikan motivasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pegawai desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Pekan Kamis sebagai motivator belum optimal atau belum terlaksana dengan baik, hal ini apabila dibiarkan tentu akan berdampak negatif terhadap kinerja bawahan dan mitra kerja Kepala Desa itu sendiri.

#### **Peran antar pribadi.**

Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya. Hal ini juga berlaku bagi kepemimpinan Kepala Desa yang harus bisa menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahan, mitra kerja bahkan bagi masyarakatnya. Berkenaan dengan itu apakah Kepala Desa Pekan Kamis sudah melaksanakan peran antar pribadi dalam kepemimpinannya ?

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Pekan Kamis belum memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan dan mitra kerjanya, hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap kepemimpinan Kepala Desa, dan juga berpengaruh terhadap pembangunan, khususnya dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.

#### **Peran Informasional.**

Peran informasional adalah bagaimana seorang pemimpin menjelaskan kepada bawahannya menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya. Peran informasional akan berjalan efektif apabila komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan baik dan efektif. Begitu juga sebaliknya apabila komunikasi tidak berjalan baik, tentu akan sangat sulit menyampaikan informasi kepada bawahan. Sehubungan dengan peran informasional ini, apakah Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, sudah menerapkan peran ini dalam kepemimpinannya, terutama dalam hal pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

Dari jawaban informan dapat diketahui bahwa komunikasi Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dengan bawahan dan mitra kerja dapat dikatakan kurang efektif dan belum baik . Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan roda pemerintahan desa, dengan sendirinya juga akan berdampak negatif terhadap pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri. Dengan demikian kedepannya perlu menjadi perhatian bagi Kepala Desa untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan semua pihak, agar peran Kepala Desa sebagai koordinator

pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, dengan sendirinya peran informasional kepala desa akan berjalan sesuai dengan fungsinya.

## PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan desa menuju desa mandiri adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan prakarsa serta kreativitas desa, agar mampu dan mandiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan desa dan peran serta masyarakat (BPMPD Kab. Inhil tahun 2012: 8).

Berdasarkan hasil jawaban informan melalui wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis mencoba membahas dan menganalisis peran Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Peran Pengambil Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dimana peran Kepala Desa sebagai pengambil keputusan belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya:

- a. Dalam menetapkan sasaran program kegiatan Desa mandiri, Kepala Desa tidak melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM)
  - b. Dalam menyusun program Desa mandiri, Kepala Desa belum mengutamakan skala prioritas.
  - c. Strategi yang dilakukan Kepala Desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat.
  - d. Alokasi sumber daya belum ditingkatkan oleh Kepala Desa.
  - e. Dalam pelaksanaan program kegiatan Kepala Desa tidak menunjuk Penanggung jawab paket kegiatan atau tidak membentuk kelompok kerja.
  - f. Dalam mengambil keputusan Kepala Desa belum arif dan bijaksana.
  - g. Sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja.
2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.

Dilihat dari peran mempengaruhi ini, Kepala Desa Pekan Kamis juga belum dapat melaksanakan perannya dengan baik, dimana seorang Kepala Desa seharusnya dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, hal ini tidak dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu kepala desa semestinya dapat memberikan contoh teladan kepada bawahan, malahan hal ini juga tidak dilakukan oleh kepala desa, melihat kenyataan ini tentu sangat sulit bagi bawahan untuk bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau hal ini masih tetap berlanjut terus menerus, sudah jelas akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa, termasuk dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan.

Motivasi merupakan istilah umum yang mencakup keseluruhan dorongan keinginan, kebutuhan, dan gaya yang sejenis (Koontz dan Weichrich dalam Uno,



2011: 66). Dengan menyatakan bahwa para manajer memotivasi bawahan, berarti mereka melakukan hal-hal yang diharapkan dapat memuaskan dorongan bagi bawahan untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan (Uno, 2011: 66).

Dengan demikian motivasi atau dorongan dari pimpinan kepada pegawai atau bawahan sangatlah diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak demikian halnya di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dari hasil wawancara langsung penulis dengan perangkat desa, dapat dibuktikan bahwa Kepala Desa boleh dikatakan tidak pernah memberikan motivasi kepada bawahan atau pegawai, sehingga dapat dipastikan semangat kerja bawahan atau perangkat desa tentu juga akan berkurang, dan apabila hal ini terjadi setiap saat tentu juga akan berdampak negatif terhadap kinerja pegawai itu sendiri, dengan demikian jelas akan berpengaruh negatif pula terhadap program pembangunan di desa itu.

4. Peran antar pribadi, yaitu peran stratejik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya.

Sebagai Kepala Desa yang menjadi figur dan tokoh yang semestinya cukup dihargai di tengah-tengah masyarakat, semestinya harus mampu memainkan perannya dalam segala hal. Kalaulah peran ini dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokoknya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tentu hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi akan dapat diatasi dengan baik. Namun kenyataan yang ditemui di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu tidak demikian, dimana Kepala Desa belum dapat melaksanakan peran antar pribadinya, hal ini dapat dilihat dari keputusan atau kebijakan yang diambil Kepala Desa tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dan pertimbangan dari bawahan apalagi dari mitra kerja, padahal hal ini sangat penting dilakukan oleh kepala desa agar keputusan dan kebijakan yang diambil tidak salah dikemudian hari.

5. Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional ini sangatlah erat kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, kalau komunikasi baik dan efektif dengan bawahan dan mitra kerja lainnya, tentu informasi yang akan disampaikan juga akan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh bawahan dan mitra kerja, begitu juga sebaliknya apabila komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan bawahan dan mitra kerja lainnya tidak efektif, jelas akan menimbulkan salah persepsi antara kepala desa dengan bawahan dan mitra kerja.

Mencermati hal ini di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, peran ini juga belum dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, hal ini terjadi karena kepala desa cenderung ingin bekerja sendiri, tanpa harus melibatkan bawahan atau mitra kerja seperti BPD dan LPM.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa berhasil atau gagalnya program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir tidak

terlepas dari peran Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di desa. Maka dapat disimpulkan:

Peran Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilihan Hulu dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri dapat dikatakan belum optimal atau belum sesuai dengan harapan, dan kurang efektif melaksanakannya sebagai koordinator pembangunan di desa, ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan sasaran program kegiatan Desa mandiri, Kepala desa tidak melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM)
2. Dalam menyusun program Desa mandiri, Kepala Desa belum mengutamakan skala prioritas.
3. Strategi yang dilakukan Kepala Desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Alokasi sumber daya belum ditingkatkan oleh Kepala Desa.
5. Dalam pelaksanaan program kegiatan Kepala Desa tidak menunjuk Penanggung jawab paket kegiatan atau tidak membentuk kelompok kerja.
6. Kepala Desa belum mengatur dan menetapkan waktu penyelesaian kegiatan, sehingga banyak kegiatan yang tidak selesai tepat waktu.
7. Kepala Desa belum memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan.
8. Dalam mengambil keputusan Kepala desa belum arif dan bijaksana.
9. Sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja.
10. Kepala Desa tidak ada memberikan motivasi terhadap bawahan.
11. Komunikasi Kepala Desa, dengan bawahan dan mitra kerja dapat dikatakan kurang baik dan kurang efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyusun dan merekomendasikan saran untuk meningkatkan peran kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya kebijakan Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri tetap di program setiap tahunnya, dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, serta lakukan pengawasan dengan baik.
2. Kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dapat mendukung Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, yang telah di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menyetujui setiap anggaran yang diajukan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir untuk program pemberdayaan desa ini.
3. Agar program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ini dapat dikelola dengan baik, kiranya BPMPD selaku leading sektor program dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengelola program dilapangan, diantaranya kepada kepala desa, sekdes, LPM dan BPD.
4. Camat selaku pembina dan koordinator pemberdayaan desa menuju desa mandiri, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, agar pelaksanaan program ini dapat dikelola dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan.
5. Agar Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri dapat terlaksana sesuai dengan harapan, kiranya Kepala Desa dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan semua mitra kerja dan stekholder yang ada di desa.
6. Kepada tokoh masyarakat dan masyarakat desa Pekan Kamis umumnya, agar mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri yang digulirkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Kepada LSM yang ada di kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dapat ikut serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta ikut memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abadi M. Husnu, Heri Zulfan, dkk. (2003), *Parlemen Desa Membangun Demokrasi aari Bawah*, Pekanbaru: UNRI Press.

Abdullah Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam rangka Otonomi menuju Desa Mandiri Tahun 2012*.

Pasalong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Uno, Hamzah B. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta, Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, *tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005, *Tentang Desa*.  
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2009, *tentang Kedudukan Keuangan Desa*.

### Sumber lain:

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, *Petunjuk teknis Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri Tahun 2012*.